

INTIZAR

Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat

Vol.12/No.2/Desember 2006

-  Kritik Ibn Taimiyyah terhadap Ajaran *Wahdat al-Wujud* Ibn Arabi
-  UU No. 14/2005 tentang Guru/Dosen: Antara Cita dan Fakta
-  Pemetaan Naskah-Naskah Keagamaan di Padang Pariaman
-  Partisipasi Sipil untuk Perdamaian: Relasi Dialektis Muslim-Kristen
-  Aplikasi Pendekatan *ESP* pada Pengajaran Bahasa Inggris di IAIN Raden Fatah
-  Tradisi Pesantren dan Terorisme: Mencari Kiprah Pesantren Kekinian

Penerbit :

Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah

Jl. Prof. K.H. Z. Abidin Fikri KM. 3,5 Palembang

Telp. 0711-354668 Fax. 0711-356092, email : Intizor_puslit@yahoo.com.

INTIZAR

Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat

INTIZAR Jurnal kajian Agama Islam dan Masyarakat diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah setiap Bulan Juni dan Desember. Edisi perdana terbit pada bulan Desember 1992 berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah. Memperoleh ISSN 1412-1697 tanggal 24 September 2001. Terakreditasi berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 49 /Dikti/Kep/2003 tanggal 9 Desember 2003. Harga berlangganan Rp. 20.000,-/eks. diluar Sumatera Selatan tambah ongkos kirim 10 Persen.

Penanggungjawab

Kepala Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah

Ketua Penyunting

Muhammad Isnaini

Wakil Ketua Penyunting

Wijaya

Penyunting Pelaksana

Abdul Karim Nasution

Dahri

Jon Heri

Mirna Ari Mulyani

Penyunting Ahli

Nasaruddin Umar (IAIN Syarif Hidayatullah)

J. Suyuthi Pulungan (IAIN Raden Fatah)

Asfari Jaya Bakri (IAIN Sultan Thaha)

Alwan Khoiri (STAIN Bengkulu)

Jalaluddin (IAIN Raden Fatah)

M. Rofiq (IAIN Walisongo)

Alih Bahasa

Ahmad Syarifudin

Jhon Nathan Fit Palmer

Tata Usaha

Ahmad Fatoni Maulana

Hasyim

Anas Syakban

M. Rafiq

Marsiyem

DAFTAR ISI

Kritik Ibn Taimiyyah terhadap Ajaran
Wahdat al-Wujud Ibn Arabi
Nyimas Anisah Muhammad, hal : 113 -132

UU No. 14/2005 tentang Guru/Dosen:
Antara Cita dan Fakta
Abdullah Idris, hal : 133 - 148

Pemetaan Naskah-Naskah Keagamaan
di Padang Pariaman
Yusri Akhimuddin, hal : 149 - 170

Partisipasi Sipil untuk Perdamaian:
Relasi Dialektis Muslim-Kristen
di Ambon 1999 - 2004
Yance Z. Rumahuru, hal : 171 - 188

Aplikasi Pendekatan ESP pada
Pengajaran Bahasa Inggris
di IAIN Raden Fatah
Dian Erlina, hal : 189 - 202

Tradisi Pesantren dan Terorisme:
Mencari Kiprah Pesantren Kekinian
M. Isnaini, hal. 203 - 213

Penyunting mengundang para ahli dan peminat untuk mempublikasikan hasil kajiannya melalui media ini. Naskah artikel diformat sesuai dengan ketentuan pada "lembar gaya". Pengelola menyunting redaksi setiap tulisan demi konsistensi gaya dan format penyajian yang dimuat diharuskan menyeter kontribusi pengembangan INTIZAR.

PARTISIPASI SIPIL UNTUK PERDAMAIAN: Relasi Dialektis Muslim-Kristen di Ambon 1999 – 2004

Oleh: Yance Z. Rumahuru*

Abstrak: *On one side, brotherhood relationship plaited in the system and regulation of Ambonese custom like gondong and pela, which is considered by the government and local society as a cohesion power among the multi faiths communities as well as a cultural media for building inter-religious dialog. Based on the observation towards several efforts for ending and preventing conflicts or reconciliation in Maluku, particularly in Ambon city, it can be concluded that there are two categories of groups, which always keep trying to arrange the dialog during the conflict for peace attainment. The first category is the groups of local communities or the initiative comes from the society. These groups can be mapped into four other groups, i.e. first, the group in the interest of economy such as papalel and traders in pasar kaget, and also the drivers of public transportation. Second, the group in educational interest consists of teachers, lecturers, high school students, and college students. The third group is the custom community, which consists of kings (leaders of customary-land) and Latupati (a group of kings in one territory), and other actors like the youth group (jujaro and mungare). The fourth group is*

* Penulis adalah Dosen STAKN Ambon

NGO/LSM and other independent peace facilitator like Bakubae movement.

Kata kunci: partisipasi, sipil, perdamaian, dan relasi dialektis

Pertikaian yang terjadi di Maluku kurun waktu 1999-2002 yang kemudian berlanjut pada tahun 2004 dengan eskalasi yang menguat di Ambon¹ berdampak pada relasi antar komunitas sosial² pada wilayah ini. Pada satu sisi hubungan persaudaraan yang terbangun dalam sistem dan pranata adat orang Ambon seperti *gandong* dan *pela* yang selama ini dianggap oleh pemerintah maupun masyarakat setempat dapat menjadi kekuatan kohesi antar komunitas yang berbeda kepercayaan sekaligus menjadi media kultural guna membangun dialog *Inter-religious* nyaris sirna dan tidak berfungsi. Sementara pada sisi yang lain upaya penghentian pertikaian, dialog, membangun perdamaian dan perbaikan terhadap kondisi sosial masyarakat menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Fakta tentang kehidupan yang tersegregasi menurut agama dan kondisi keamanan yang tidak menentu semakin memperburuk berbagai upaya dan kebijakan guna membangun relasi dialogis³ antar komunitas sosial sebagai upaya membangun perdamaian dan persaudaraan sejati di Ambon maupun Maluku.

Dalam pengamatan terhadap upaya-upaya penghentian pertikaian, pencegahan dan rekonsiliasi di Maluku khususnya di kota Ambon, dapat disebutkan bahwa terdapat dua (2) kategori kelompok yang selama pertikaian berlangsung berusaha membangun dialog sebagai upaya perdamaian. Pertama adalah kelompok-kelompok komunitas setempat atau dapat disebut sebagai inisiatif yang muncul dari masyarakat. Kelompok ini dapat dipetakan menjadi empat (4) kelompok lagi, masing-masing pertama, kelompok kepentingan ekonomi seperti *papalele*⁴ dan penjual di *pasar kaget*⁵ serta para sopir penumpang umum dan angkutan barang. Kedua kelompok kepentingan pendidikan, dalam hal ini para guru, dosen serta siswa dan mahasiswa. Kelompok ketiga adalah kelompok komunitas adat. Dalam hal ini terdapat raja-raja (pemimpin negeri adat) dan *Latupati* (kumpulan raja-raja dalam satu teritori) serta aktor lainnya seperti para pemuda (*jujaro* dan *mungare*). Kelompok keempat adalah

NGO/LSM dan fasilitator perdamaian independent lainnya seperti gerakan *Bakubae*.

Kategori kelompok kedua adalah institusi pemerintah. Terdapat sejumlah forum atau tim bentukan pemerintah untuk membangun dialog dan upaya perdamaian. Momentum penting yang dilakukan pemerintah untuk dialog dan inisiatif damai adalah perjanjian Maluku di Perjanjian Malino (Tanggal, 12-13: 2002), dimana pemerintah pusat menjadi mediator dan memfasilitasi pertemuan komunitas Islam dan Kristen dari Maluku bersama-sama dengan pemerintah membicarakan penghentian pertikaian dan menghasilkan butir-butir perjanjian Maluku di Malino atau yang dikenal dengan Malino II.

Tulisan ini memberikan fokus pada dialog dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat atau komunitas lokal setempat. Dengan begitu, yang menjadi persoalan pokok dari penulisan ini adalah: bagaimana pihak-pihak yang bertikai dalam konflik komunal di kota Ambon menggunakan kearifan lokal (*local wisdom*) atau kebanggaan-kebanggaan lokal setempat sebagai sarana dialog dan upaya membangun perdamaian.

Dialog dan Inisiatif Damai oleh Masyarakat di Ambon

1. Kelompok kepentingan ekonomi

Yang dimaksudkan dengan kelompok kepentingan ekonomi di sini adalah kelompok-kelompok masyarakat biasa yang karena tuntutan kebutuhan hidup (terutama makan) mengorganisir diri secara diam-diam untuk berkomunikasi dengan pihak lain di luar komunitasnya.

*Papalele*⁶ dan Penjual di 'Pasar Kaget'⁷

Pada minggu-minggu pertama pertikaian di Ambon, aktivitas ekonomi terutama pasar lumpuh total. Dua buah pasar utama di kota Ambon yakni pasar Mardika dan pasar Gambus terbakar. Begitu pula jalur transportasi yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya di kota Ambon macet karena dipalang atau dibarikade (ditutup) oleh masing-masing kelompok masyarakat, sehingga tidak ada distribusi bahan pangan dari satu tempat ke tempat lain.

Di Passo sampai dengan tahun 2000 masih ada petani asal Sulawesi dan Jawa (beragama Islam) yang menanam sayur-sayuran di samping penduduk 'asli' Passo sendiri. Begitu pula sebaliknya di wilayah Batumerah terdapat tempat penampungan ikan milik beberapa pengusaha di samping hasil tangkapan nelayan tradisional yang banyak, tetapi tidak bisa didistribusikan ke wilayah lain. Komunikasi antar wargapun terputus. Masing-masing komunitas sosial (Islam dan Kristen) tetap berada pada wilayahnya sendiri, sementara konflik terus bereskalasi tinggi. Dalam kondisi seperti ini terdapat kelompok-kelompok masyarakat pada kedua komunitas yang secara sembunyi-sembunyi dan penuh resiko saling berkomunikasi dan mengadakan transaksi kebutuhan pangan untuk dijual kepada masyarakat di lingkungannya.

Sopir Angkutan Umum dan Angkutan Barang

Seperti disebutkan, selama pertikaian tidak ada transportasi yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya di Ambon dan komunitas agama tertentu tidak bisa melewati wilayah komunitas agama lainnya. Dalam kondisi seperti ini, terdapat inisiatif dari beberapa sopir angkutan umum dan barang untuk melakukan transaksi pada wilayah-wilayah yang netral. Hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui publik, karena cukup beresiko bagi keselamatan mereka sendiri maupun penumpang dan barang bawaannya. Apa yang dilakukan mereka sering mendapat teror dari orang-orang tidak dikenal, tetapi mereka memiliki cara tersendiri sehingga proses ini tetap berjalan selama konflik.

Kelompok Nelayan

Tidak banyak orang yang mengetahui kalau nelayan lokal memiliki mekanisme sendiri untuk berjumpa satu dengan yang lainnya. Beberapa informan di Ambon menyebutkan, sering terjadi perjumpaan antar sesama nelayan di beberapa tempat (perairan) saat pertikaian. Umumnya mereka saling menukar informasi dan hasil tangkapan untuk di jual ke masyarakat.

2. Kelompok kepentingan pendidikan

Ketika terjadi pertikaian, beberapa sekolah hancur, dan para siswa dari komunitas agama yang berbeda hampir tidak bisa belajar bersama.

Umumnya dibuka sekolah-sekolah 'alternatif' pada masing-masing lingkungan. Walau begitu, dalam melakukan aktifitasnya selalu ada koordinasi antara para guru melalui dinas Pendidikan Nasional setempat untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar maupun penyamaan persepsi terhadap kondisi yang dialami. Jadi kegiatan kelompok kepentingan pendidikan nampak terutama melalui penyelenggaraan pendidikan atau aktivitas belajar mengajar. Di kota Ambon misalnya, sampai dengan tahun 2001 masih ada sekolah-sekolah tertentu yang menyelenggarakan pendidikan (pengajaran) dengan keterlibatan siswa dari kedua komunitas agama.

Di tingkat universitas, inisiatif untuk dialog dan upaya perdamaian nampak dalam aktivitas di kampus. Di Universitas Pattimura (Unpatti) misalnya, terdapat kesepakatan seluruh civitas akademika untuk menjadikan kampus wilayah netral. Hal ini diikuti oleh penciptaan mekanisme internal untuk memproteksi wilayah kampus dari berbagai kemungkinan penyusupan dan provokasi di kampus. Walau pada akhirnya satu-satunya universitas kebanggaan orang Maluku ini dijarah dan dirusakkan, setelah perumahan warga disekitarnya diserang dan dibakar pada tahun 2001. Contoh lain adalah Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM). Sekalipun terjadi pertikaian yang melibatkan agama dan UKIM juga menjadi sasaran perusuh⁸, namun Mahasiswa yang beragama Muslim pada beberapa Fakultas tetap dilindungi dan diberikan kesempatan hingga menamatkan studinya.

Inisiatif damai oleh kelompok kepentingan pendidikan juga muncul melalui kajian-kajian yang diberikan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan di daerah maupun pemerintah pusat. Disamping itu, terdapat personal-personal maupun kelembagaan dari kelompok ini, dalam berbagai aktivitas rekonsiliasi oleh pemerintah maupun lembaga independen lainnya. Salah satu kegiatan yang patut disebutkan sebagai bagian dari upaya dialog dan inisiatif damai yang dilakukan oleh pihak Unpatti adalah bekerja sama dengan Gerakan *Bakubae* Maluku dan Yayasan Kemala melakukan Musyawarah Raja-raja dan Latupati yang berlangsung selama tiga hari (tanggal 9–11 Januari 2003) di kampus Universitas Pattimura. Pertemuan ini kemudian melahirkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi dibidang pendidikan, ekonomi, penanganan pengungsi, sosial budaya serta hukum dan keamanan (Ichan Malik dalam L. Letemia (ed), 2003: 1-9).

3. Kelompok komunitas adat

Diketahui kalau agama di seting menjadi dominan selama pertikaian dan hampir menjadi kesepakatan umum kalau pertikaian yang terjadi di Maluku adalah konflik agama. Hal mana berimplikasi pada relasi antar sesama umat beragama, di mana tingkat kecurigaan dan pemikiran negatif oleh masing-masing penganut agama begitu tinggi. Agama menjadi sensitif bagi komunitas di Ambon. Dalam kondisi seperti ini terdapat inisiatif dari tokoh-tokoh adat yang untuk waktu lama tidak berperan. Mereka membangun komunikasi melalui pendekatan kultural yang dimilikinya. Komunikasi sebagai mana dimaksud, umumnya diawali dengan kelompok atau negeri-negeri yang memiliki hubungan genealogi dan hubungan kultural tertentu. Baik yang sekandung (*gandong*) maupun yang ada keterikatan karena perjanjian leluhur (*pela*). Relasi terbatas ini kemudian diperluas ke wilayah lain untuk membuka jalur-jalur transportasi dan komunikasi sehingga memungkinkan terjadinya perjumpaan dan saling memasuki wilayah-wilayah lain, yang selama pertikaian dianggap rawan oleh masing-masing komunitas. Sebagai contoh, di kota Ambon negeri Batumerah (Islam) dengan negeri Passo (Kristen) dalam relasi sebagai *pela*.

Fakta mengenai relasi antara negeri-negeri yang memiliki hubungan kultural di Maluku khususnya di Ambon atau Maluku Tengah dapat dilihat dalam dua bentuk. Bentuk pertama, menghindari konflik dengan negeri yang berpela atau bergandong. Kedua, sebagian turut terlibat dalam penyerangan terhadap negeri-negeri yang berpela dan bergandong. Bentuk pertama merupakan bentuk yang umum dilakukan oleh kebanyakan negeri di Maluku Tengah. Bahkan mereka saling melindungi dan saling membantu selama pertikaian terjadi. Orang-orang Batumerah dan Passo termasuk dalam kelompok ini. Bentuk kedua jarang terjadi di Maluku Tengah. Tercatat tiga (3) kasus di Maluku Tengah untuk melihat kelompok ini. Pertama, Orang Pelauw (negeri Islam di pulau Haruku) menyerang orang Hulaliuw (negeri Kristen di pulau Haruku) relasi Pelauw dan Hulaliuw adalah sebagai *gandong*. Kedua, Orang Rutha (negeri Islam di Seram Selatan) turut terlibat dalam penyerangan ke Amahai (negeri Kristen di Seram Selatan). Relasi mereka adalah sebagai *gandong*. Ketiga, sebagian orang Hitu (negeri Islam di pulau Ambon) turut terlibat dalam penyerangan ke Rumahtiga (negeri di p.Ambon, penduduknya bercampur namun yang asli adalah beragama Kristen). Relasi mereka adalah *pela*.

Dialog dan inisiatif damai oleh masyarakat di Ambon secara luas dapat dilihat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat kurun waktu 1999 sampai 2003. Dalam hal ini melalui pembentukan forum bersama, kegiatan kebersamaan, maupun komunikasi dan perjumpaan satu dengan yang lainnya. Tidak semua peristiwa dicatat dalam penulisan ini hanya beberapa sebagai contoh. Pertama, di daerah Ahuru Kota Ambon, prakarsa damai dilakukan diantara para tokoh masyarakat (dan agama) setempat, dengan melibatkan masyarakat sekitar, khususnya Karangpanjang dan Batumerah pada tanggal 21 Januari 1999. Interaksi dua komunitas diwujudkan dalam acara makan bersama, serta kesepakatan untuk tidak memperluas konflik. (Jecky Manuputty & Daniel Watimanela, CSPS Book 2004)⁹.

Kedua, di wilayah desa Wayame. Dalam hal ini dibentuk Tim 20 Wayame sejak bulan Pebruari 1999. Tim yang secara imbang keanggotaannya melibatkan dua komunitas ini, sejak awal pembentukannya bertekad menjaga dan mempertahankan desa Wayame dari imbasan konflik. Dalam implementasi kegiatannya, secara ekstrim tim ini menghindari intervensi eksternal dalam upaya mempertahankan keamanan di wilayah mereka. Sekalipun di kemudian hari beberapa kalangan menilai kedudukan kilang distribusi minyak pulau Ambon di wilayah desa Wayame merupakan indikasi tidak diserangnya Wayame, namun pada kenyataannya pertahanan bersama dua komunitas di Wayame tetap utuh terjaga sampai konflik fisik di Maluku dianggap berakhir (Ibid).

Dialog dan inisiatif damai yang dilakukan antara Passo dan Batumerah dapat disebutkan sebagai berikut¹⁰: *Pertama*, mengintensifkan komunikasi antar kedua pemerintah negeri. Dilakukan baik melalui pertemuan langsung maupun melalui telepon. Hal ini telah dilakukan sejak awal terjadi pertikaian di Ambon. *Kedua*, saling memberikan bantuan, *ketiga*, mengontrol masing-masing warga untuk tidak terlibat dalam pertikaian yang terjadi dimana pun. *Keempat*, memberikan sosialisasi tentang sistem dan pranata adat yang dimiliki kepada masyarakat secara luas. *Kelima*, makan patita bersama; keenam, saling berkunjung dan mengusahakan agar negeri mereka menjadi wilayah yang netral bagi semua komunitas.

Salah satu kontribusi pemuda di Passo untuk membangun dialog dan upaya perdamaian adalah dengan berinisiatif membentuk Forum Baku Bae Pemuda Baguala, tahun 2001. Bentuk forum ini tidak melembaga, namun sifatnya koordinatif. Kegiatan forum ini dianggap cukup efektif selama kurang lebih satu tahun, dengan cara menggalang aktifitas bersama antar remaja dan pemuda dari dua komunitas di wilayah Baguala (pulau Ambon).

Atas koordinasi Forum Baku Bae, terjadi sejumlah pertemuan baik antar para pemuda di wilayah Baguala maupun pertemuan antar para tokoh adat dan pemimpin negeri di wilayah Baguala di kota Ambon dan meluas sampai ke wilayah Salahutu dan Leihitu yang secara administratif masuk dalam wilayah pemerintahan Maluku Tengah. Implementasi dari berbagai pertemuan forum ini nampak secara konkrit seperti membuka barikade pada wilayah masing-masing, menyiapkan masyarakat untuk tidak menghalangi perjalanan komunitas lain yang melewati wilayah mereka, yang kemudian memungkinkan operasinya jalur transportasi darat dari bandara ke kota Ambon dan transportasi Liang – Tulehu – kota Ambon.

Jecky Manuputty dan Daniel Watimanela menyebutkan, pertemuan-pertemuan tertutup disektor ikatan adat selama pertikaian tetap berlangsung dengan melibatkan komunitas adat lain, sebagai akibat adanya ritual-ritual adat yang keabsahannya tergantung pada kehadiran negeri atau komunitas adat lainnya; yang terikat hubungan 'Pela dan Gandong'. Di desa Seith – Pulau Ambon misalnya, tak banyak orang mengetahui bahwa rehabilitasi 'Rumah Raja'/kepala desa selama konflik, dilakukan dengan melibatkan para pemuda desa Ouw yang beragama Kristen dari Pulau Saparua. Kehadiran para pemuda desa Ouw yang secara adat terikat pada 'hukum Gandong', bahkan dirahasiakan dari desa-desa tetangganya yang beragama Muslim (Jecky Manuputty & Daniel Watimanela, CSPS Book 2004).

Pendekatan budaya (adat) untuk penyelesaian pertikaian juga terjadi di berbagai daerah di luar pulau Ambon. Sebagai contoh, di kepulauan Kei dan di pulau Seram yang sanggup menghentikan pertikaian dan menjaga sehingga pertikaian tidak melebar luas ke wilayah lainnya di pulau-pulau tersebut. Pendekatan yang sama nampak juga di pulau Buru setelah terjadi pertikaian, di mana antara sesama orang Buru yang berbeda

agama tetap menjaga relasi di antara mereka. Hanya saja sering terjadi provokasi dengan berbagai ancaman dari kelompok tertentu kepada komunitas setempat yang diketahui tetap membangun relasi dengan sesama mereka dalam ikatan kultural yang dimiliki.

4. Dialog dan Inisiatif Damai oleh NGO dan Lembaga Independent lainnya

Satu fenomena menarik adalah selama berlangsungnya pertikaian di Maluku bermunculan banyak (lebih dari 200) LSM. Sebelumnya jumlah LSM di Maluku tidak mencapai 20. Konsentrasi lembaga-lembaga ini awalnya, terutama untuk memberikan bantuan emergensi serta penanganan masalah-masalah terkait dengan pengungsi. Dikemudian hari beberapa LSM memberikan konsentrasi juga terhadap masalah rekonsiliasi dan rehabilitasi. Bahasan atas bagian ini hendak menampilkan Forum, Lembaga dan LSM yang terbentuk dan atau dalam implementasi programnya memungkinkan terciptanya dialog dan upaya perdamaian di Ambon.

Terdapat banyak forum selama pertikaian, namun satu forum yang terbentuk sebagai inisiatif kelompok sosial dari kalangan Mahasiswa dan beberapa Organisasi Kepemudaan di awal pertikaian adalah Forum Antar Iman, yang terbentuk tanggal 27 Januari 1999 (delapan hari setelah pecah pertikaian). Dalam kondisi kepanikan masyarakat di kota Ambon yang mengalami konflik berdarah selama 1 (satu) minggu, para pemuda dan Mahasiswa berkumpul atas inisiatif Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku melakukan pertemuan bersama mencari solusi terhadap penghentian pertikaian dan pencegahan terhadap kemungkinan melebarnya pertikaian.

Beberapa kajian forum ini yang selanjutnya tersosialisasi ke masyarakat adalah pertama pertikaian yang terjadi bukanlah konflik agama. Kedua, sumber konflik bukanlah masyarakat di Maluku, sekalipun pertikaian mengambil momen pemicu dari peristiwa pemalakan di Batumerah yang dinyatakan oleh pemerintah daerah sebagai peristiwa kriminal biasa. Forum ini selanjutnya memberikan sosialisasi dan aksi sosial serta bantuan emergensi kepada komunitas-komunitas sosial di Ambon dan beberapa tempat lain sepanjang tahun 1999. Sosialisasi dilakukan pada kedua komunitas, mengambil tempat di Gereja dan Mesjid

dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat maupun Wali kota Ambon dan Dandrem Pattimura (saat itu belum terbentuk kodam) (Hasil penelitian November 2004 - Februari 2005 di Ambon).

Penelitian yang dilakukan di Ambon menemukan bahwa sebagian besar LSM atau lembaga independen lainnya yang bekerja bagi masyarakat di Ambon sekalipun tidak memiliki konsentrasi dan program yang langsung terhadap dialog dan upaya perdamaian, namun dari kegiatan yang dilakukan, nampak bahwa mereka telah melakukan peran yang baik untuk membangun dialog dan upaya perdamaian di Ambon. Sebagai contoh, beberapa LSM dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama LSM Baeleo. Sebelum kerusuhan LSM ini dikenal sebagai salah satu dari LSM di Maluku, yang memiliki jaringan luas di Masyarakat. Di awal kerusuhan, jaringan yang telah ada sebelumnya kemudian dimanfaatkan dalam upaya penanganan dampak konflik. Terutama untuk proses emergency distribusi pangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Mekanisme jaringan yang sudah ada sebelumnya kemudian disesuaikan dengan kondisi segregasi masyarakat akibat konflik, dengan cara membangun simpul-simpul jaringan distribusi kebutuhan dasar pokok pengungsi. Dalam perkembangan kemudian jaringan ini mengembangkan kegiatannya untuk mendorong interaksi diantara para pengungsi berbeda agama yang ditempatkan pada fasilitas-fasilitas militer di pulau Ambon. Antara lain yang berada di kompleks Lanal AL Ambon. Pendekatan ini cukup efektif untuk mengkondisikan rasa senasib dan sepenanggungan diantara pengungsi, yang menjadi salah satu modal utama dalam membangun proses rekonsiliasi. (Jecky Manuputty & Daniel Watimanela, CSPA Book 2004).

Kedua, koalisi 13 LSM lokal yang menamakan diri 'Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Maluku (TIRUS)' kemudian bergerak secara bersama dengan mengadopsi model simpul jaringan di wilayah Kristen maupun Islam. Koordinasi kegiatan bersama serta forum evaluasi rutin dengan melibatkan ratusan komponen relawan Muslim maupun Kristen, memungkinkan TIRUS muncul secara menonjol dan diterima masyarakat dari kedua belah pihak yang bertikai (Ibid).

Ketiga, Gerakan Perempuan Peduli (GPP) muncul secara efektif sebagai gerakan bersama sekelompok ibu-ibu pada periode awal tahun 2000. Gerakan yang awalnya diinisiasi oleh beberapa ibu Protestan dan

Katolik, kemudian melibatkan juga pihak kelompok ibu-ibu Muslim. Sejak awal gerakan ini sudah mendorong terjadinya proses penghentian konflik dan membangun rekonsiliasi, demi nasib anak-anak dan keutuhan keluarga. Gugatan gerakan ini senantiasa terdengar vokal dan militan, semilitansi sikap mereka untuk mengkondisikan berbagai program penyadaran publik terhadap dampak konflik. Terutama yang diarahkan bagi kalangan perempuan di Maluku (Ibid).

Keempat, Tim Relawan untuk Ambon (TIRA), merupakan satu kelompok peneliti antar iman yang berbasis di Yogyakarta, dan berulang kali memasuki Maluku dalam implementasi program mereka. Tim yang beranggotakan dosen-dosen UGM ini, dalam realitasnya mencoba menggalang terjadinya dialog-dialog internal antara mereka dengan publik. Maupun yang menjembatani dialog publik secara terbatas dan informal. Sikap informal ini cukup efektif untuk membangun jaringan komunikasi antar komponen masyarakat, yang dalam banyak hal menjadi sangat jenuh dengan upaya-upaya formal rekonsiliasi, yang ujung-ujungnya menjadi macet. Melalui ruang-ruang dialog informal di tengah publik, rasa percaya satu terhadap lainnya bertumbuh secara alamiah. Sekalipun tak serta merta interaksi terbatas ini bisa ditransfer menjadi milik kolektif publik, namun setidaknya pendekatan ini menyumbangkan simpul lain dalam jalinan upaya-upaya interaksi (Ibid).

Dua lembaga lain yang patut disebutkan dan diberikan apresiasi positif terkait dengan dialog dan inisiatif damai di Ambon adalah pertama, Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) NU Maluku yang bersekretariat di jalan Jendral Soedirman Batumerah atas. Kedua, Jesuit Refuge Service (JRS) Ambon.

LAKPESDAM-NU Maluku beberapa tahun terakhir memberikan perhatian terhadap pengembangan kapasitas dan advokasi komunitas lokal; disamping pemberian berbagai bantuan darurat. Dalam implementasi program hal menarik yang dikerjakan mereka dengan penuh resiko adalah tinggal dalam waktu yang cukup lama bersama korban dan masyarakat lokal setempat. Pendampingan mereka membuahkan hasil yakni terbangun kembali hubungan antar komunitas pengungsi (korban pertikaan) dengan komunitas negeri sekitar yang sebelumnya bertikai, saling membunuh, membantai dan memusnahkan melalui pendekatan kultural. Dalam hal ini komunitas-komunitas sosial didekati dengan

menelusuri latar historis untuk menemukan kesamaan-kesamaan antar komunitas seperti marga, matarumah, atau hubungan geneologis namun mereka terpisah sejak para leluhur mereka karena memilih mengikuti agama tertentu. Islam atau Kristen, atau tetap memeluk agama suku.

Komunitas yang menjadi subyek pendampingan mereka dengan model ini antara lain: pertama di Ambon, terhadap masyarakat negeri Waai dan negeri Liang Kedua, kepada komunitas negeri Saunolu, pengungsi asal Tehoru (Seram Selatan) yang berada di pegunungan Wahai (Seram Utara) dan komunitas negeri Yaputy dan beberapa komunitas lain di Tehoru. Ketiga terhadap komunitas adat di Seram Timur Werinama.

Jesuit Refuge Service (JRS) Ambon telah ada sejak 1999 dengan konsentrasi pada penanganan pengungsi. Sesungguhnya JRS melihat pendidikan anak-anak luar sekolah dengan mengambil basis pada tiga tempat masing-masing di Ambon, Masohi (p.Seram) dan di Buru¹¹. Dalam pendampingan kepada masyarakat, JRS banyak melakukan fungsi mediasi, dan hal ini sangat membantu masyarakat yang bertikai untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk membangun rekonsiliasi.

Respons terhadap Proses Dialog dan Inisiatif Damai oleh Masyarakat

Menurut saya, aktivitas yang dilakukan kelompok kepentingan ekonomi, pada satu sisi dapat dilihat sebagai murni motif ekonomi. Di mana kondisi seperti disebutkan merupakan peluang yang baik bagi mereka untuk meraih keuntungan yang besar dari hasil jualannya. Tetapi pada sisi yang lain, tanpa disadari oleh mereka maupun kebanyakan orang, inisiatif mereka untuk berkomunikasi dan berjumpa (*bakudapa*) satu dengan yang lainnya dalam kondisi yang penuh resiko ini telah turut membantu mencairkan perlahan-lahan kebekuan dan kemacetan akibat pertikaian yang ganas itu. Komunikasi dan perjumpaan mereka dapat dilihat sebagai point penting untuk proses dialog dan upaya perdamaian Ambon. Alasannya, pertama, melalui perjumpaan dan komunikasi, kecurigaan dan pandangan negatif oleh masing-masing orang atau kelompok berangsur-angsur hilang dan mulai terbangun sikap saling percaya, minimal di antara para distributor atau sesama penjual. Kedua, melalui perjumpaan dan sikap saling percaya, masing-masing orang sadar

ataukah tidak, telah menyatakan kesediaan untuk mau saling mendengar dan belajar satu dengan yang lainnya¹².

Sikap yang ditunjukkan oleh papalele dan penggiat pasar kaget maupun para sopir dan nelayan seperti disebutkan, dapat dilihat sebagai hal mendasar untuk melakukan dialog sebagaimana dikatakan Swidler. Sikap seperti di tunjukan mereka, potensial bagi upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Di mana telah nampak penerimaan satu terhadap yang lainnya.

Teramati bahwa kelompok pendidikan merupakan salah satu kelompok strategis yang diharapkan dapat memberikan transformasi pemahaman melalui pendidikan agar tercipta kesadaran untuk hidup berdampingan serta membangun kelas menengah dengan kesadaran pluralisme. Namun demikian kondisi makro di Maluku terutama di kota Ambon sering diusil oleh kelompok kepentingan tertentu yang sengaja menghalang proses dimaksud. Dalam pengamatan saya, terdapat kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang mengambil sikap kontraproduktif satu dengan yang lainnya, disamping perspektif yang berbeda mengenai rekrutmen pegawai di lingkungan pendidikan. Contoh dari kasus ini adalah Universitas Pattimura, yang beberapa tahun belakangan selalu menjadi masalah apabila ada rekrutmen staf pengajar dan pegawai atau suksesi kepemimpinan Universitas (Harian Ambon Expres & Metro Maluku, Januari-Februari 2005).

Fakta tentang adanya negeri-negeri yang berpela atau bergandong saling menyerang pada saat pertikaian, menunjukkan kepada kita kalau relasi pela dan gandong tidak dapat diandalkan untuk mempertahankan relasi antar komunitas umat beragama di Ambon. Faktor utama yang menyebabkan hal ini dapat dilihat melalui kebijakan kekuasaan rezim Orde Baru. Di mana selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, partisipasi dan kreativitas masyarakat melalui budaya lokal ditekan. Pemberlakuan UU No 5 tahun 1979 adalah bukti yang menjadi sebab rapuhnya berbagai struktur dan tatanan adat di Maluku. Hal mana berpengaruh sehingga ketika terjadi konflik, pendekatan kultural yang dibangun mengalami kemandekan. Apalagi generasi sekarang sebagian besar tidak tahu lagi tentang nilai-nilai adatis yang dimiliki.

Penutup

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat dipahamai bahwa: pertama, upaya penghentian dan pencegahan pertikaian, serta berbagai usaha kearah pemulihan kondisi masyarakat selama pertikaian di Ambon menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih pendekatan dengan *setting* kultural, sekalipun masih nampak persoalan-persoalan struktural dalam *setting* kultural itu sendiri. Hal mana dapat dipahami dengan melihat fenomena perebutan 'pengaruh', keinginan menjadi yang 'unggul' dan kecenderungan menguasai kelompok atau komunitas yang lain. Baik dalam bentuk penguasaan teritori atau ekspansi wilayah, maupun posisi-posisi struktural di bidang politik, birokrasi, pendidikan, TNI dan POLRI serta berbagai bidang publik lainnya.

Kedua, pendekatan kultural lebih dapat diterima dan dianggap oleh komunitas sosial di Ambon, sebagai sesuatu yang lebih baik dari pendekatan lainnya karena pertama, idiologi atau kepentingan yang dibawah dapat dipahami dengan jelas oleh semua orang. Kedua, pendekatan kultural dianggap sebagai sesuatu yang membatin, sekalipun ada jarak yang cukup besar antara generasi tua dan generasi muda atau orang yang 'asli' dan 'pendatang' dalam hal memahami budaya setempat. Ketiga, figur-figur adat lebih dikenal dan diterima dalam komunitasnya. Keempat, aktivitas yang dilakukan sekalipun sederhana namun menyentuh kebutuhan nyata masyarakat setempat.

Kontras dengan itu, pendekatan struktural dianggap kurang berhasil karena pertama, diduga terdapat idiologi yang berbeda dari masing-masing pihak (aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan keamanan). Lebih jauh dapat disebutkan bahwa terdapat 'benturan idiologi' di antara birokrasi, aparat keamanan (TNI-POLRI), politisi, akademisi, penegak hukum, praktisi, tokoh adat dan agama serta pers dalam memandang pertikaian di Ambon (Maluku) dan penyelesaiannya. Kedua, kecenderungan represif dan tidak menyentuh akar masalah. Ketiga, tidak nampak jelas pelibatan tokoh-tokoh informal yang merepresentasikan komunitas tertentu karena diterima dalam komunitasnya. Keempat, belum nampak implementasi kebijakan secara terstruktur dan berkesinambungan secara baik.

Terlepas dari dikotomi yang menyolok antara pendekatan dari bawah dengan pendekatan yang cenderung *top down*, poin penting yang

perlu diperhatikan dalam berbagai kasus dan contoh yang disebutkan dalam penulisan ini adalah, pendekatan kultural potensial membantu penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya struktural.

End Note

¹ Penyebutan Ambon dalam penulisan ini tidak dimaksudkan sebagai satu wilayah administratif, dan politik tetapi lebih menunjuk kepada suatu lingkup sosial dan budaya. Menurut Antropolog senior Unipersitas Patimura, Prof. J.Ajawaila, *term* Ambon sesungguhnya dikenakan kepada orang-orang atau negeri-negeri yang berada pada pulau-pulau di Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut, (Lease) dan Seram. Penulis cenderung menggunakan kata Ambon dalam pengertian seperti disebutkan ini karena secara kultural komunitas-komunitas penghuni pulau-pulau tersebut memiliki kesamaan budaya. Fakta historis yang masih diketahui hingga kini adalah pengakuan bahwa penduduk pulau-pulau tersebut berasal dari Seram. Di mana antara negeri yang satu dengan negeri yang lainnya pada pulau yang berbeda memiliki hubungan gandong dan pela.

² Dalam penulisan ini saya menggunakan istilah komunitas sosial untuk menyebutkan komunitas atau umat beragama Islam dan Kristen di Ambon yang terjebak berhadap-hadapan satu dengan yang lainnya. Penggunaan istilah komunitas sosial sekaligus dimaksudkan untuk meminimalisir kecenderungan mengikutsertakan agama dalam berbagai konfrontasi atau pertikaian dalam masyarakat.

³ Martin Forward menjelaskan bahwa dialog secara substansial terjadi apabila pertama, adanya perjumpaan dan pertemuan. Kedua, adanya unsur kepercayaan atau saling percaya dan saling memahami. Ketiga, bersedia untuk berbagi dan saling melayani. Sejalan dengan Forward, Leonard Swidler memberikan perhatian pada aspek komunikasi aspek perbedaan dan partisipasi dalam hal membangun dialog. Selanjutnya Leonard Swidler menyebutkan bahwa dialog mendalam (*deep dialogue*) merupakan suatu hal yang penting melampawi dua orang atau lebih, dalam hal ini setiap orang berdiri pada posisinya dan pada waktu yang sama melakukan transformasi dengan membuka diri terhadap perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh orang lain Untuk lebih jelas lihat Martin Forward, *Inter-Religious Dialogue, One World, Oxford, 2001* page. 11. Leonard Swidler, *After the Absolute; The Dialogical Future of Religion Reflection*, Augsburg Fortress, 1990, page 3, Leonard Swidler and Paul Mojzes, *The Study of Religion in an Age of Global Dialogue*, Temple University Press, Philadelphia, 2000, page.151.

⁴ Papalele adalah istilah di Ambon untuk menyebutkan pedagang kecil yang berjualan keliling membawa barang dagangannya berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. namun demikian dibedakan dari pedagang asongan di tempat lain. Umumnya papalele adalah orang yang membawa dan menjual hasil panen kebunnya sendiri seperti buah-buahan, sayuran dan jenis umbi-umbian. Atau hasil tangkapan ikannya. Belakangan ini barang dagangan mereka sudah cukup variatif dan bisa saja dibeli dari tempat lain kemudian dijual kembali.

⁵ Pasar kaget adalah suatu istilah yang baru muncul pada tahun 1999 atau setelah pertikaian di Ambon. Yang dimaksudkan adalah para penjual kontemporer yang selama konflik berinisiatif menjual kebutuhan pangan seadanya pada wilayah-wilayah pemukiman warga. Sejak tahun 2002 telah dilakukan lokalisasi oleh pemerintah kota Ambon pada lokasi pasar yang dibangun pemerintah, namun masih cenderung memotong pasar dengan berjualan pada pinggir jalan dan pemukiman warga.

⁶. Papalele adalah istilah di Ambon untuk menyebutkan pedagan kecil yang berjualan keliling kota dan kampung-kampung membawa barang dagangannya berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Yang membedakan papalele dengan pedagang asongan di tempat lain adalah umumnya papalele membawah dan menjual hasil panen kebunnya sendiri seperti buah-buahan, sayuran dan jenis umbi-umbian. Atau hasil tangkapan ikannya. Sedangkan pedagang asongan biasanya mengambil/membeli barang dagangannya dari supermarket atau bisa saja diorganisir oleh kelompok usaha tertentu. Belakangan ini barang dagangan para papalele sudah cukup bervariasi, tidak terbatas pada hasil produksi sendiri tetapi bisa saja dibeli dari tempat lain kemudian dijual kembali.

⁷. Pasar kaget adalah suatu istilah yang baru muncul pada tahun 1999 atau setelah pertikaian di Ambon. Yang dimaksudkan adalah para penjual 'kontemporer' yang selama konflik berinisiatif menjual kebutuhan pangan seadanya pada wilayah-wilayah pemukiman warga. Sejak tahun 2002 telah dilakukan lokalisasi oleh pemerintah kota Ambon pada lokasi pasar yang di bangun pemerintah, namun masih cenderung memotong pasar dengan berjualan pada pinggir jalan dan pemukiman warga.

⁸. UKIM terletak tepat di kota Ambon, berdekatan dengan pemukiman komunitas Muslim maupun Kristen. Selama pertikaian selalu menjadi sasaran penyerangan dari kelompok perusuh. Motif dibalik penyerangan itu tidak jelas. Motivasi penyerangan terhadap UKIM terlepas dari pelabelan Kristennya yang dilihat sebagai satu simbol keagamaan tertentu, tetapi dugaan yang kuat adalah sama seperti penghancuran tempat-tempat pendidikanlainnya secara misterius, sedang terjadi pembodohan secara sistematis terhadap orang Maluku. UKIM kemudian berhasil dibobol dan dibakar habis pada tanggal 23 Juni 2001. Yang tersisa adalah satu unit perpustakaan dan satu unit bangunan baru yang kemudian direnovasi dan digunakan kembali sejak tahun 2003. Pada tanggal 25 April 2004, kampus UKIM kembali diserang dan membunuhanguskan perpustakaan, laboratorium Bahasa, laboratorium Komputer dan laboratorium fakultas Teknik Sipil. Data yang disebutkan merupakan hasil penelitian lapangan November 2004 – Februari 2005 di Ambon.

⁹. Hasil penelitian di Ambon (Batumerah dan Passo), November 2004 – Februari 2005. Banding Jecky Manuputty dan Daniel Watimanela, dalam Lambang T. eds. POTRET RETAK NUSANTARA, Studi Kasus Konflik di Indonesia, Yogyakarta: CSPS BOOKS 2004.

Menurut penuturan warga setempat, sama seperti Manuputty dan Watimanela sebutkan, pertemuan antar komunitas atas prakarsa tokoh masyarakat maupun agama baik secara tertutup maupun terbuka, yang diakhiri dengan acara 'makan patita' bersama terjadi di berbagai wilayah kota Ambon maupun di seluruh Maluku. Hal mana dimaksudkan terutama sebagai upaya pencegahan perluasan konflik. Namun demikian berbagai upaya yang dilakukan tidak mampu menahan terjadinya pertikaian. Disayangkan bahwa upaya-upaya spontan masyarakat untuk meredam konflik dan membangun interaksi bersama, sangat bergantung kepada dinamika dan eskalasi konflik. Kontinuitasnya tak berlangsung linear. Meskipun demikian kelenturan model-model interaksi ini, tetap memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan dinamika konflik yang berkembang. Satu hal yang lemah dari upaya-upaya rekonsiliasi resmi yang dilakukan berbagai pihak, bahwa segmen-segmen interaksi publik ini hampir tak pernah terjamah sebagai modal sosial yang telah tersedia dalam masyarakat.

¹⁰. Hasil penelitian di Passo dan Batumerah, November 2004 – February 2005.

Bibliografi

- Baum G. & Wells H., eds. 1997. *The Reconciliation of Peoples: Challenge to the Churches*, WCC Publication and ORBIS BOOKS.
- Broek Theo van den dan Rudolf Kambayong, 2004. *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi*, Jayapura : LSPP dan SKP.
- Galtung J. 1996. *Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Cicilization*, , SAGE Publications, New Delhi.
- Kurtz Lester R., 1995. *Gods in the Global Vilage: The Wordl's Religion in Sosiological perspective*, Pine Forge Press.
- Lambang T. 2001. *Keluar Dari Kemelut Maluku, Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Maluku*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lambang T. eds. 2004. *POTRET RETAK NUSANTARA, Studi Kasus Konflik di Indonesia*, Yogyakarta: CSPS BOOKS.
- Leatemala R.,(ed) 2003. *Mematakan Kekerasan Dengan Semangat Bakubae*, Jakarta: PT. Praja Multi Pritindo.
- Lederach John P., 1999. *The Journey Toward Reconciliation*, Herald Press, Scottdale, Pennsylvania Waterloo,Ontario.
- Lefebure Leo D., 2000. *Revelation, The Religions And Violence*, Orbis Books, New York.
- Pieris John., 2004. *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Swidler Leonard., 1990. *After the Absolute: The Dialogical Future of Religion Reflection*, Augsburg Fortress.
-, ed. 1992. *Muslims In Dialogue: The Evolution of A Dialogue*, UK: The Edwin Millen Press.
- Swidler L and Mojzes P., 2000. *The Study of Religion in an Age of Global Dialogue*, Temple University Press, Philadelphia.